

Analisis Pembangunan Ekonomi, Sosial, dan Lingkungan Berbasis Hutan di Provinsi Nusa Tenggara Barat

Wahyudi Susanto¹

¹ Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Bappenas

Korespondensi: * wahyudi.susanto@bappenas.go.id

 <https://doi.org/10.47266/bwp.v7i2.321> | halaman: 119 - 140

Dikirim: 05-06-2024 | Diterima: 31-07-2024 | Dipublikasikan: 31-07-2024

Abstrak

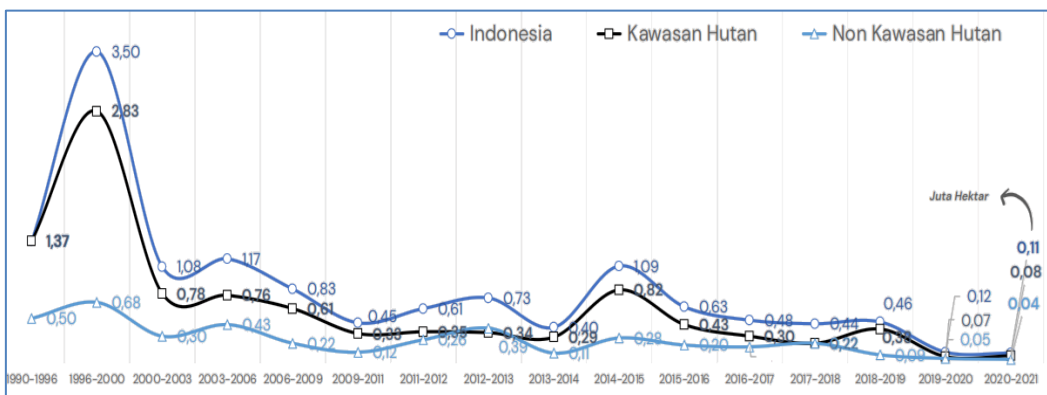
Studi ini ditujukan untuk mengetahui capaian pembangunan kehutanan dengan langkah rehabilitasi hutan dan lahan kritis di Provinsi NTB berbasis *road map* RHL NTB 2016-2026. Di sisi lain, studi ini juga bertujuan untuk menganalisis strategi langkah RHL yang berkelanjutan dan memiliki nilai tambah. Dari studi ini diharapkan dapat memberikan: tersusunnya langkah-langkah strategis RHL yang efektif, efisien, dan tepat sasaran sebagai bagian dari pembangunan kehutanan berkelanjutan di Provinsi NTB; tercapainya perencanaan peningkatan kualitas hutan dan lahan melalui pengelolaan hutan lestari; tercapainya pembangunan yang selaras dengan *core business* kehutanan; dan meningkatnya taraf hidup masyarakat yang tinggal di sekitar kawasan hutan. Metode yang digunakan adalah diskusi terfokus; pengambilan data primer dan analisisnya dengan teknis analisis leverage dan; wawancara; studi literatur; dan observasi lapangan. Untuk mencapai pembangunan yang berkelanjutan berbasis hutan, dari hasil studi ini adalah: penyusunan langkah strategis RHL yang efektif, efisien, dan tepat sasaran sebagai bagian dari pembangunan kehutanan berkelanjutan; peningkatan kualitas hutan dan lahan melalui pengelolaan hutan lestari; pembangunan yang selaras dengan *core business* kehutanan; dan meningkatkan taraf hidup masyarakat yang tinggal di sekitar kawasan hutan.

Kata kunci: pembangunan hutan; analisis leverage; analisis keberlanjutan.

I. Pendahuluan

1.1. Latar Belakang

Berdasarkan Rencana Kehutanan Tingkat Nasional (RKTN) 2011-2030 dan data yang diterbitkan oleh Kementerian LHK tahun 2019, total luas hutan di Indonesia adalah 125,92 juta ha yang terdiri atas 54% hutan produksi, 24% hutan lindung, dan 22% hutan konservasi. Indonesia juga melakukan perhitungan tingkat deforestasi secara berkala. Gambar 1 menunjukkan bahwa deforestasi tahunan di dalam kawasan hutan yang mengalami kenaikan 0,82 juta ha selama periode 2014-2015. Pada periode berikutnya, laju deforestasi mengalami penurunan, kemudian meningkat kembali hingga 0,37 juta ha pada tahun 2019 dan terus menurun selama pandemi Covid-19 pada 2021 seluas 110 ribu ha. Berdasarkan data yang dikeluarkan oleh Kementerian LHK sampai dengan tahun 2022, terdapat sekira 14,36 juta ha lahan di dalam dan di luar kawasan hutan yang mengalami degradasi cukup parah.



Gambar 1. Tren deforestasi hutan di Indonesia

Sumber: KLHK, 2020

Selama kurun waktu 2015 hingga 2019, pemerintah telah menetapkan target untuk mengurangi luasan lahan kritis sebesar 5,5 juta ha. Rehabilitasi hutan dan lahan merupakan salah satu kegiatan prioritas pemerintah untuk memulihkan lahan kritis serta meningkatkan tutupan hutan yang ada. Untuk memperbesar efektivitas dan memperkuat sinkronisasi rehabilitasi hutan dan lahan, diperlukan perencanaan, koordinasi, dan tindakan kolaboratif yang komprehensif yang melibatkan pemangku kepentingan dari tingkat pemerintah pusat, pemerintah daerah, hingga tingkat tapak. Untuk mencapai hal tersebut, perlu penguatan sistem perencanaan dengan memanfaatkan digitalisasi, peningkatan sistem dan efisiensi produksi hutan yang menerapkan prinsip lestari, serta meningkatkan peran perhutanan sosial sebagai salah satu aktor dalam pelaksanaan dan pengamanan hutan dalam mendukung keberhasilan rehabilitasi hutan dan lahan.

Pembangunan kesejahteraan masyarakat yang dibarengi dengan perbaikan sosial dan kelestarian lingkungan menjadi penting. Dalam konteks kegiatan ini, kami berencana untuk mengimplementasikannya di Provinsi Nusa Tenggara Barat sebagai pilot project. Provinsi Nusa Tenggara Barat memiliki kawasan hutan seluas 1.187.581 ha. Kondisi perekonomian Provinsi Nusa Tenggara Barat sebagian besar disumbang oleh sektor pertanian. Selain itu, masyarakat melakukan pembukaan hutan dengan fokus tanaman pertanian berupa jagung untuk meningkatkan produksi pertanian meskipun pemerintah setempat berusaha mencegah kegiatan tersebut. Beberapa cara telah dilakukan untuk meningkatkan pendapatan masyarakat setempat melalui penanaman tanaman keras dengan skema agroforestri, salah satunya dengan menanam tanaman yang digunakan untuk produksi minyak atsiri. Berdasarkan tujuan meningkatkan

kesejahteraan masyarakat dan melestarikan hutan yang dipulihkan dan dipelihara, hutan menjadi salah satu pilar potensi ekonomi yang menjanjikan di masa depan dengan prinsip keberlanjutan. Selain itu, hutan juga dapat memberikan ketahanan pangan bagi masyarakat dengan menanam sistem agroforestri.

Provinsi Nusa Tenggara Barat dipilih karena Gubernur menyampaikan komitmennya terhadap pentingnya rehabilitasi hutan dan lahan untuk memulihkan kesejahteraan masyarakat berbasis lingkungan. Selain itu, berdasarkan hasil analisis Balai Pengelolaan Daerah Aliran Sungai dan Hutan Lindung (BPDASHL) Dodokan Moyosari, Provinsi Nusa Tenggara Barat memiliki luas lahan kritis sebesar 501.360 ha. Lahan kritis ini menjadi salah satu faktor penting untuk menentukan lokasi kegiatan rehabilitasi hutan dan lahan, tentunya dengan penambahan parameter-parameter lainnya. Pelaksanaan kegiatan ini diharapkan dapat memperkuat perencanaan, koordinasi, dan keselarasan antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan masyarakat di tingkat tapak dengan memanfaatkan platform digital. Pada tingkat tapak, kegiatan ini akan meningkatkan kesadaran dan partisipasi masyarakat lokal untuk melindungi dan memanfaatkan hutan secara lestari untuk kesejahteraan ekonomi dan sosial mereka, serta sebagai sarana untuk mencapai pembangunan berkelanjutan dalam kelestarian lingkungan, kemakmuran ekonomi, dan pembangunan pedesaan di sekitar hutan.

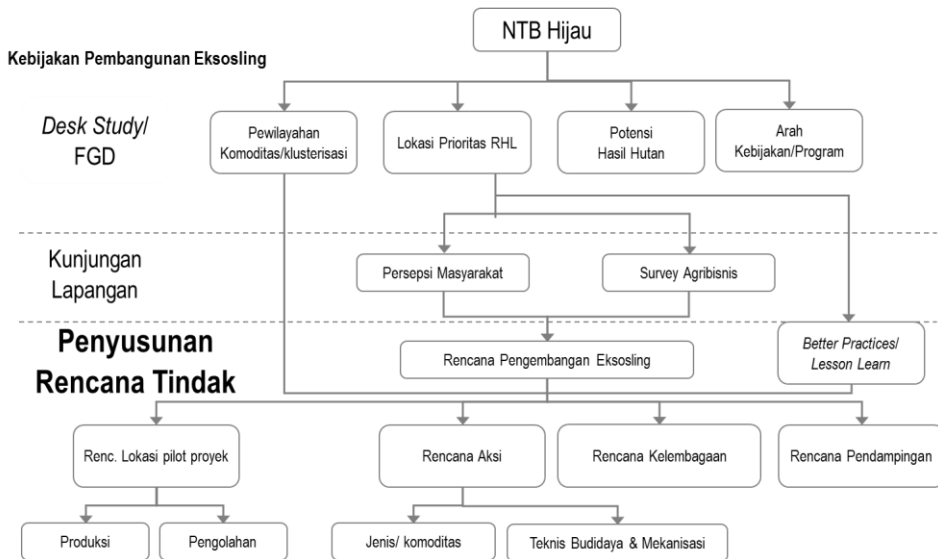
Masyarakat lokal, terutama yang tinggal di desa-desa sekitar kawasan hutan, telah terlibat dalam kegiatan kehutanan selama beberapa dekade terakhir sehingga sebagian besar masyarakat lokal memiliki berbagai pengetahuan terkait praktik kehutanan. Namun, masyarakat lokal yang sebagian besar bergantung pada sumber daya hutan untuk memenuhi kebutuhannya, belum mampu mengelola hutan di sekitarnya dengan baik. Masyarakat lokal yang hidup berdampingan dengan hutan memiliki peran penting dalam pemanfaatan hasil hutan secara lestari serta perlindungan dan pelestarian sumber daya hutan.

1.2. Permasalahan

Bagaimana strategi untuk meningkatkan kualitas perencanaan dalam bentuk rekomendasi yang menjadi acuan untuk mencapai Pembangunan Ekonomi, Sosial, dan Lingkungan Berbasis Hutan di Provinsi NTB dalam rangka mewujudkan NTB Hijau guna mencapai sasaran yang ingin dicapai di antaranya adalah:

- a) tersusunnya langkah-langkah strategis RHL yang efektif, efisien, dan tepat sasaran sebagai bagian dari pembangunan kehutanan berkelanjutan di Provinsi NTB;
- b) tercapainya kualitas hutan dan lahan melalui pengelolaan hutan lestari;
- c) tercapainya pembangunan yang selaras dengan *core business* kehutanan; dan
- d) meningkatnya taraf hidup masyarakat yang tinggal di sekitar kawasan hutan.

1.3. Kerangka Kerja Logis



Gambar 2. Kerangka kerja kegiatan pembangunan ekonomi sosial dan lingkungan berbasis hutan di Provinsi NTB

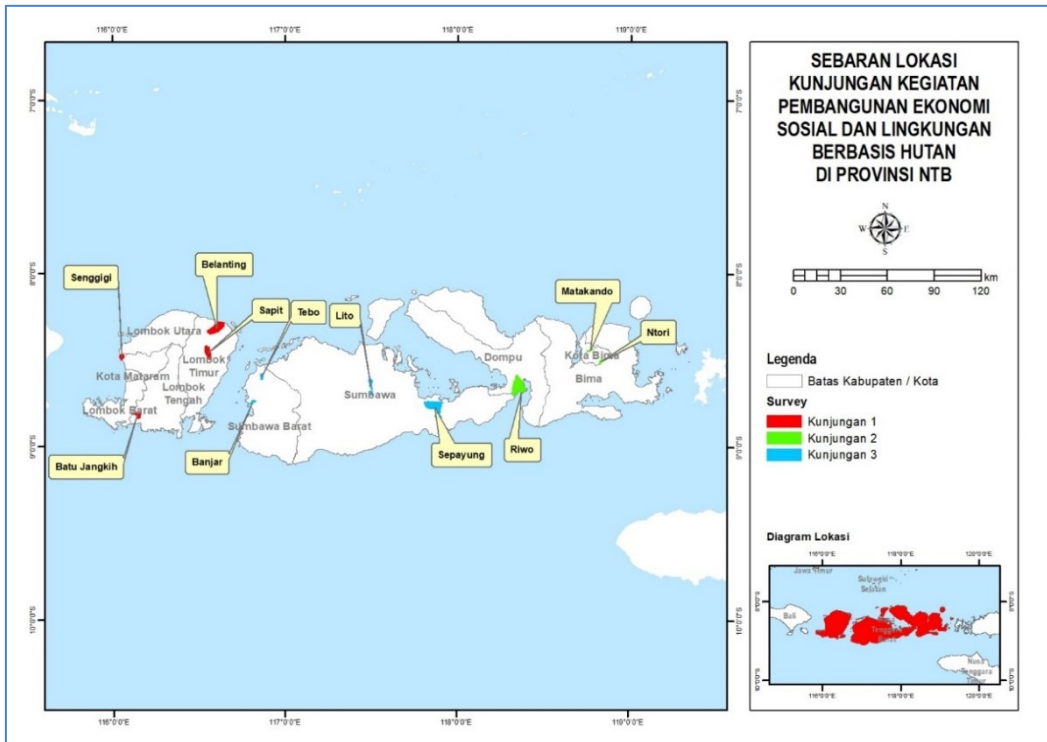
Sumber: Bappenas 2023, diolah.

II. Metode

2.1. Lokasi Kegiatan

Telah dilakukan teridentifikasi sebanyak 17 desa yang telah dipilih di Provinsi NTB berdasarkan beberapa pertimbangan sebagaimana yang disajikan pada gambar berikut. Berikut adalah pertimbangan teknis.

1. Aksesibilitas menuju desa.
2. Keberadaan lahan kritis di dalam dan di luar kawasan hutan di wilayah desa.
3. Aksesibilitas menuju lahan kritis di wilayah desa baik di dalam dan di luar kawasan hutan.
4. Adanya kelembagaan pemangku kawasan hutan.
5. Ketersediaan Kelompok Tani Hutan yang akan berkontribusi sebagai tenaga kerja dalam kegiatan Rehabilitasi Hutan dan Lahan terutama pada sub kegiatan penanaman, pemeliharaan dan penyiangan tanaman selama 3 tahun proses RHL (P0, P1 dan P2).
6. Adanya komoditi dan potensi komoditi yang rantai pasoknya sudah terbentuk namun masih perlu pengembangan.
7. Hasil analisis keberlanjutan dari masing-masing komoditi menggunakan *software* Multi Dimensional Scalling Raise Appraisal of Fisheries (MDS-RAPFISH) dan Analisis *Leverage*.



Gambar 3. Peta sebaran pengambilan data analisis pembangunan ekonomi sosial dan lingkungan berbasis hutan di Provinsi NTB

Sumber: Bappenas 2023, diolah

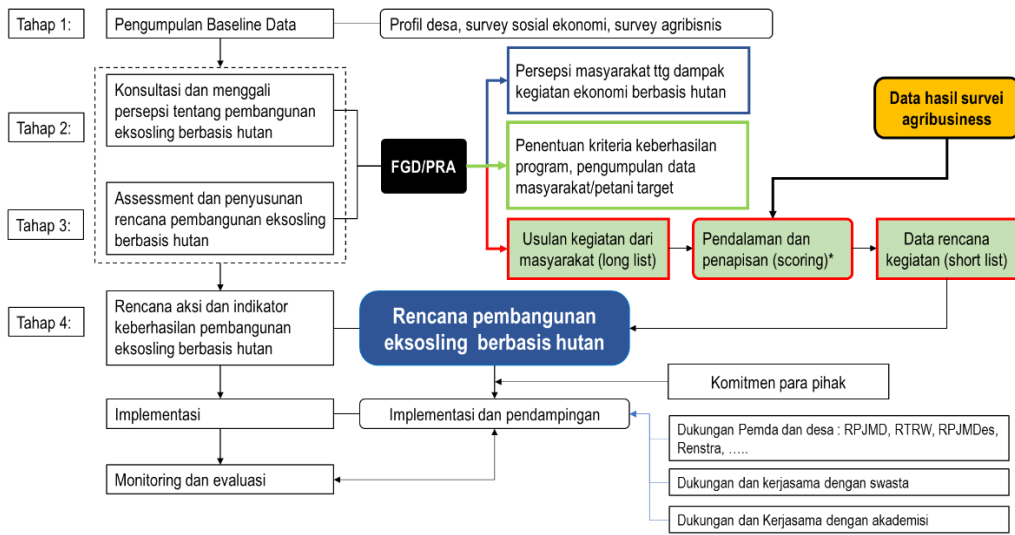
2.2. Metode Studi

Kegiatan dilaksanakan dengan metode kualitatif dan kuantitatif dengan mempertimbangkan kebutuhan data berupa data primer dan data sekunder yang dikumpulkan antara lain melalui kegiatan *desk study*, diskusi terfokus (*focus group discussion/FGD*), dan kunjungan lapangan.

Desk study dilakukan dengan mengevaluasi pencapaian, permasalahan, dan tantangan kegiatan RHL Provinsi NTB serta mengkaji dokumen-dokumen perencanaan pembangunan yang relevan. *Desk Study* yang terdiri dari evaluasi pencapaian RHL Provinsi NTB sampai dengan Tahun 2022 yang tertuang dalam dokumen *Road Map* RHL 2016-2026 (di tingkat *input*, *output*, dan *outcome*); dan analisis umum permasalahan dan tantangan kegiatan RHL Provinsi NTB hingga tahun 2022 meliputi beberapa aspek, di antaranya: perencanaan kegiatan; kebutuhan pelaksanaan kegiatan; ekonomi; kelembagaan; rantai pasok; industrialisasi; sosial; status lahan; serta pasar.

2.3. Data

Data primer dalam studi ini berasal dari hasil FGD, pengisian kuisioner, wawancara, dan observasi. Sedangkan data sekunder, bersumber dari dokumen perencanaan yang relevan. Basis data spasial bersumber dari Program Satuan Pemetaan Sasaran Satu Alas Kementerian PPN/Bappenas dan Dinas LHK Provinsi NTB.



Gambar 1. Tahapan penyusunan rencana tindak di tingkat tapak

Sumber: Bappenas 2023, diolah

III. Hasil dan Pembahasan

3.1. Review Literatur

3.1.1. Isu Strategis dan Arah Kebijakan

Berdasarkan dokumen Rencana Strategis Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Nusa Tenggara Barat 2019-2023, terdapat 5 (lima) isu strategis, 3 (tiga) strategi dan 4 (empat) arah kebijakan yang berkaitan dengan rencana pembangunan ekonomi sosial dan lingkungan berbasis hutan di Provinsi Nusa Tenggara Barat, seperti yang disajikan pada tabel berikut.

Tabel 1. Isu strategis, strategi dan arah kebijakan yang terkait dengan pembangunan ekonomi sosial dan lingkungan berbasis hutan di Provinsi NTB dalam Renstra Dinas LHK Provinsi NTB 2019-2023

Isu Strategis	Strategi	Arah Kebijakan
<ul style="list-style-type: none"> Masih rendahnya partisipasi masyarakat dalam pengelolaan lingkungan hidup. Belum optimalnya operasionalisasi kelembagaan di tingkat tapak; Terjadinya degradasi ekosistem hutan, danau, dataran rendah, serta pesisir dan laut; Rendahnya nilai tambah produk kehutanan; dan Pemanfaatan potensi sumber daya hutan masih terbatas. 	<ul style="list-style-type: none"> Peningkatan partisipasi dan peran serta masyarakat dalam pengelolaan lingkungan hidup. Peningkatan upaya konservasi dan partisipasi masyarakat di bidang kehutanan. Peningkatan upaya rehabilitasi hutan dan lahan yang dilindungi. 	<ul style="list-style-type: none"> Melaksanakan pemulihan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup. Melaksanakan perencanaan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup provinsi. Melakukan kegiatan perlindungan konservasi sumber daya alam hayati dan ekosistemnya. Peningkatan kapasitas penyuluh kehutanan dan pemberdayaan masyarakat di bidang kehutanan.

Sumber: Rencana Strategis Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Nusa Tenggara Barat 2019-2023

3.1.2. Kondisi Lahan Kritis di Provinsi Nusa Tenggara Barat

Lahan kritis di Provinsi NTB dihitung seluas 501.148,26 ha atau sebesar 24,90% dari total luas wilayah provinsi. Luas lahan kritis terluas berada di Kabupaten Sumbawa yakni seluas 199.755,85 ha atau sebesar 39,86% dari total luas lahan kritis di Provinsi NTB. Data selengkapnya disajikan pada Tabel 2 berikut.

Tabel 2. Luas Lahan Kritis di Provinsi NTB Menurut Kabupaten

No	Kabupaten	Luas Menurut Kawasan (ha)		Luas Total (ha)	Persentase
		Kawasan Hutan	Area Penggunaan Lain		
1	Bima	61.825,25	55.704,39	117.529,64	23,45%
2	Dompu	33.893,10	44.432,55	78.325,65	15,63%
3	Kota Bima	609,68	2.070,31	2.679,99	0,53%
4	Lombok Barat	11.430,94	13.858,64	25.289,58	5,05%
5	Lombok Tengah	3.214,92	10.915,24	14.130,16	2,82%
6	Lombok Timur	8.578,86	18.880,11	27.458,97	5,48%
7	Lombok Utara	65,94	7.821,39	7.887,33	1,57%
8	Sumbawa	73.023,55	126.732,31	199.755,85	39,86%
9	Sumbawa Barat	10.029,86	18.061,22	28.091,08	5,61%
Grand Total		202.672,11	298.476,15	501.148,26	100%

Sumber: SPS Satu Alas KemenPPN/Bappenas, 2023

3.1.3. Capaian RHL di Provinsi NTB

Berdasarkan *Road Map* RHL NTB Hijau 2019-2023, luas area yang ditargetkan untuk direhabilitasi pada akhir periode NTB Hijau di tahun 2023 adalah seluas 152.858 ha. Sedangkan realisasi sampai tahun 2022 baru tercapai seluas 40.264,81 ha atau sebesar 34,66% dari luas yang ditargetkan secara kumulatif di tahun 2022 yakni seluas 116.171 ha. Data capaian RHL dari NTB Hijau 2019-2023 selengkapnya disajikan pada Tabel 3 berikut.

Tabel 3. Target dan Capaian RHL Menurut Road Map NTB Hijau 2019-2023

Tahun	Luas (ha)					
	Target		Realisasi		Lokasi	
	Tahunan	Kumulatif	Tahunan	Kumulatif	Dalam Kawasan	Luar Kawasan
2019	7.972,00	7.972,00	9.753,85	9.753,85	4.495,45	5.258,40
2020	34.084,00	42.056,00	10.270,50	20.024,35	2.812,00	7.458,50
2021	36.360,00	78.416,00	9.534,46	29.558,81	3.350,00	6.184,46
2022	37.755,00	116.171,00	10.706,00	40.264,81	N/A	N/A
2023	36.687,00	152.858,00	N/A	N/A	N/A	N/A

Sumber: Dinas LHK Provinsi NTB, 2023

3.1.4. Capaian RHL dari BPDASRH Dodokan Moyosari

Berdasarkan data dari Balai Pengelolaan Daerah Aliran Sungai dan Rehabilitasi Hutan (BPDASRH) Dodokan Moyosari Provinsi Nusa Tenggara Barat, sejak tahun 2015 sampai dengan tahun 2021, lahan yang telah direhabilitasi di Provinsi NTB dihitung seluas 40.485 ha dengan luas capaian terluas dicapai pada tahun 2019 yakni seluas 7.600 ha. Sedangkan tahun 2021 tercapai areal yang direhabilitasi seluas 6.100 ha. Data selengkapnya disajikan pada Tabel 4 berikut.

Tabel 4. Luas Capaian Kinerja RHL dari BPDASHL Dodokan Moyosari

No	Kegiatan	Luas Menurut Tahun Kegiatan (ha)							Luas Total (ha)
		2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	
1	Rehabilitasi Hutan	1.125	1.525	610	1.005	3.100	1.500	1.525	10.390
2	RHL HHBK			200	200				400
3	Rehabilitasi Lahan Sumber Bibit PP	3.750	5.000	5.000	3.000	3.000	3.000	3.000	25.750
4	Rehabilitasi Lahan melalui KBR dan KBD	200	400	320	200	1.000	750	1.075	3.695
	Total	4.325	5.925	5.130	4.905	7.600	5.750	6.100	40.485

Sumber: BPDASHL Dodokan Moyosari, 2023

3.2. Hasil Studi

Pokok persoalan yang ditemui di lapangan antara lain: Pemasaran hasil HHBK belum optimal; penyuluhan dan pendampingan kurang intensif; Sulitnya mendapatkan bibit unggul; petani belum menerapkan praktik budidaya yang sesuai dengan prinsip-prinsip *Good Agricultural Practices* (GAP); etos kerja masyarakat lokal di bawah rata-rata; akses pendanaan RHL masih bersumber dari APBN dan APBD; infrastruktur pertanian masih rendah, terutama akses untuk menuju sumber air; lahan tidur masih luas dan tidak tergarap. Implikasi dari persoalan yang telah disebutkan antara lain: petani memerlukan bantuan sarana dan prasarana budi daya (bibit unggul, pemeliharaan, perlindungan HPT); perlunya program yang terkait dengan peningkatan nilai tambah melalui penanganan pasca produk, pengolahan, dan atau pemasaran; petani memerlukan bantuan alat pertanian; perlu dukungan infrastruktur pengelolaan, terutama akses terhadap sumber daya air; perlu bantuan pemasaran komoditi.

Berdasarkan hasil studi, setidaknya terdapat beberapa upaya yang dapat dilakukan untuk mengatasi permasalahan yang terjadi, antara lain: peningkatan kapasitas penyuluh kehutanan dan pemberdayaan masyarakat di bidang kehutanan; memfasilitasi pelatihan *Good Agricultural Practices* (GAP) dan *Good Handling Practices* (GHP); penyediaan bibit unggul (antara lain: alpukat, durian, kopi dan jahe) untuk rehabilitasi lahan kritis; dan memfasilitasi pemasaran produk kopi dari KTH HKm Dongo Baru untuk pangsa pasar di Taman Nasional Gunung Rinjani dan industri kopi di sekitar areal Sembalun.

Secara umum, pola agroforestri merupakan yang paling cocok dalam rencana pembangunan ekonomi sosial dan lingkungan berbasis hutan di Provinsi NTB. Oleh karena itu, tanaman utama dan tanaman sela yang digunakan sebagai tanaman rehabilitasi perlu memberikan kontribusi secara ekonomi kepada masyarakat yang mengelola lokasi sasaran RHL, yakni lahan kritis baik di dalam dan di luar kawasan hutan. Jenis-jenis komoditi yang saat ini diusahakan oleh kelompok tani hutan dan jenis-jenis komoditi yang digunakan dalam rencana pengembangan di lokasi *pilot project* selengkapnya disajikan pada tabel berikut.

Tabel 5. Jenis-jenis komoditi yang diusahakan dan komoditi untuk rencana pengembangan menurut kelompok tani di lokasi studi

Lokasi <i>Pilot Project</i>	Kelompok Tani	Jenis Komoditi		
		Saat Ini Diusahakan	Rencana Pengembangan	
			Tanaman Utama	Tanaman Sela
Desa Senggigi Kec. Batu Layar Kab. Lombok Barat	HKm Merte Sari KTH Sukamaju II	Gula Aren	Aren	Empon-empon
		Jeruk	Jeruk	
		Empon-empon		
Desa Sapit Kec. Suela Kab. Lombok Timur	HKm Dongo Baru	Jahe	Alpukat	Kopi
		Kopi	Durian	
		Cengkeh		
		Alpukat Durian		
Desa Belanting Kec. Sambelia Kab. Lombok Timur	KTH Pade Pacu	Mete	Mete	Jagung
		Jagung	Mangga Alpukat	
Desa Batu Jangkih Kec. Praya Barat Daya Kab. Lombok Tengah	KTH Maju Bersama	Porang	Mete	Rumput Gajah
		Mete		
		Rumput Gajah		
Desa Riwo Kec. Woja Kab. Dompu	KTH Meci Angi	Jagung	Mahoni Nangka Mangga	Srikaya ¹ Empon-empon
		Tembakau		
		Srikaya		
		Mangga		
		Pepaya		
		Nangka Empon-empon		
Desa Ntori Kec. Wawo Kab. Bima	KTH Dana Kala	Kemiri	Kemiri Nangka Mangga	Jahe merah
		Nangka		
		Mangga		
	KTH Mandanae	Kopi	Kemiri Alpukat	Kopi Jahe Kunyit
		Jahe		
		Kunyit		
	KTH Aman	Kopi	Kemiri Alpukat	Kopi Jahe Kunyit
		Kemiri		
	KTH Bolampoli	Alpukat	Kemiri Alpukat	Jahe
		Kemiri		
KTH Solela Olemada	Nangka	Kemiri Nangka Durian	Jahe	
	Durian			
KTH Sotolonggalaraya	Rambutan	Rambutan Kemiri	Jahe Kunyit	
	Kemiri			
	Jahe Kunyit			
KTH Donggonae	Alpukat	Alpukat Kelengkeng Durian	Jahe	
	Kelengkeng			
	Durian			
KTH Riap Lestari		Kemiri	Kemiri	Jahe

¹ Selain sebagai konsumsi buah yang menyehatkan, Srikaya juga memiliki manfaat untuk ibu hamil. biji buah Srikaya dapat digunakan sebagai pestisida nabati. Misalnya ekstrak biji Srikaya digunakan untuk mengendalikan serangan hama ulat *Spodoptera litura* (Setiowati, 1995) *Plutella xylostella* (Febrianni *et al.*, 2011) dan Rayap tanah (Alfian, 2007). Ekstrak biji Srikaya berfungsi sebagai racun perut pada serangga hama tersebut.

Lokasi <i>Pilot Project</i>	Kelompok Tani	Jenis Komoditi		
		Saat Ini Diusahakan	Rencana Pengembangan	
			Tanaman Utama	Tanaman Sela
Kel. Matakando Kec. Mpunda Kota Bima	KTH Batumara	Kemiri	Kemiri	Jahe
	HKm Batawawi	Kacang Mete Kemiri Kopi Mangga Jagung Kacang- kacangan	Mete Kemiri Mangga	Kopi Jagung
Desa Banjar Kec. Taliwang Kab. Sumbawa Barat	KTH Sahabat Bumi	Jati Mahoni Jati Putih	Mahoni Jati Putih	Kaliandra Merah
	Desa Tebo Kec. Poto Tano Kab. Sumbawa Barat	KTH Belantara Hijau	Jati Putih	Jati Putih Kaliandra Merah
Desa Sepayang Kec. Plampang Kab. Sumbawa	KTH Bukit Sari	Jati Kayu Putih Jagung Madu trigona	Jati Kayu Putih	Jagung Madu trigona
	Desa Lito Kec. Moyo Hulu Kab. Sumbawa	HKm Samoko	Jati Madu Gadung Umbi-umbian	Jati Madu Gadung Umbi-umbian

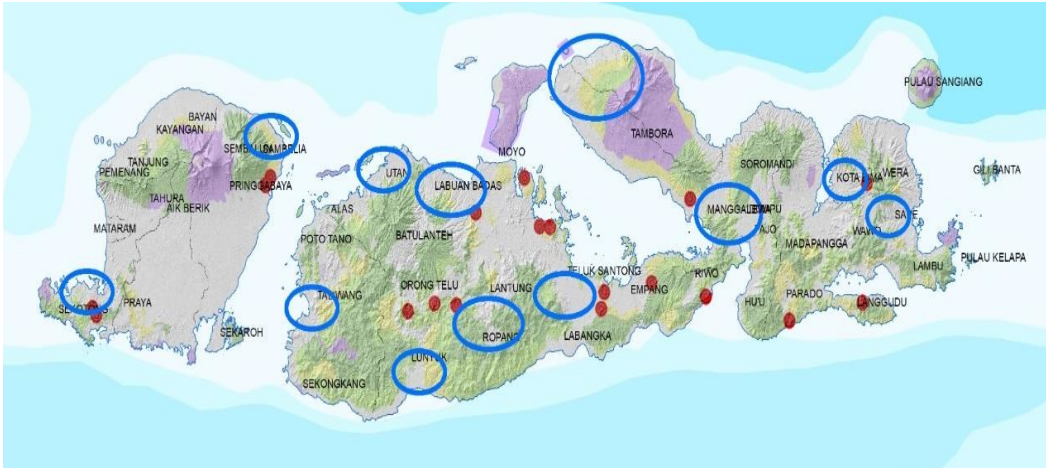
Sumber: Bappenas, 2023

3.3. Strategi Membangun Panutan yang Berhasil

Target penanaman dalam rangka rehabilitasi hutan dan lahan kritis di seluruh Provinsi NTB sebagaimana yang tertuang dalam *Road Map* RHL NTB 2016-2026 adalah terehabilitasinya kawasan hutan dan lahan kritis seluas 126.928,93 ha, dengan indikator kinerja terehabilitasinya kawasan hutan dan lahan kritis seluas 12.692,9 ha/tahun. Langkah-langkah strategis RHL yang efektif, efisien, dan tepat sasaran sebagai bagian dari pembangunan kehutanan berkelanjutan di Provinsi NTB dapat dilakukan melalui penetapan lokasi prioritas RHL, fasilitasi KTH, pendampingan, realisasi skema RHL dan penerapan agroforestri.

3.3.1. Lokasi Prioritas

Salah satu permasalahan hutan dan lahan di Provinsi NTB adalah belum adanya perencanaan dan sasaran yang jelas dalam pelaksanaan program rehabilitasi hutan dan lahan kritis di Provinsi NTB. Kegiatan RHL hanya didasarkan pada usulan dari tingkat lapangan tanpa memiliki rencana makro yang bersifat jangka panjang. Penetapan lokasi prioritas sebagai titik pertumbuhan RHL yang berbasis pengembangan wilayah menjadi penting dalam menjawab permasalahan RHL yang ada di NTB saat ini. Dasar penetapan dapat beragam, namun kepastian lokasi menjadi wajib sebagai langkah awal perencanaan. Lokasi *pilot project* dapat menjadi salah satunya, atau penetapan didasarkan pada tujuan untuk ketahanan bencana dan perubahan iklim seperti yang disajikan pada gambar berikut.



Gambar 2. Peta indikatif lokasi kegiatan RHL untuk ketahanan bencana dan perubahan iklim

Sumber: Bappenas, 2023

3.3.2. Penguatan Organisasi KTH

Tata laksana kegiatan rehabilitasi hutan dan lahan kritis tidak berorientasi hasil akhir, baru sebatas menanam bibit, tanpa disertai dengan pemeliharaan yang intensif. Pelaksanaan RHL dilaksanakan oleh unit-unit pengelolaan hutan yang berada di tingkat tapak antara lain KPH, Kelompok Tani Hutan dan para pemegang ijin pemanfaatan dan atau penggunaan kawasan hutan. Oleh karena itu, memfasilitasi KTH dalam penguatan organisasi petani perlu dilakukan yang mana hal ini akan mendorong dan memastikan perusahaan swasta pemegang Ijin Pinjam Pakai Kawasan Hutan (IPPKH), IUPHKm, investor pemegang IUPJLHL/P, dan IUPJLHL/P, IUPHHK, IUPHHBK, Ijin Industri Primer Hasil Hutan Kayu, Ijin Industri Primer Hasil Hutan Bukan Kayu, perusahaan tambang, perusahaan air minum, provider telepon seluler, BUMN/BUMD, dan mitra kehutanan lainnya secara konsisten, nyata dan terukur dapat melakukan kegiatan reklamasi kawasan sesuai kewajibannya dan mengoptimalkan penggunaan dana CSR-nya untuk kegiatan rehabilitasi hutan dan lahan.

3.3.3. Mobilisasi Penyuluh

Diperlukan penyesuaian dari metode pendampingan. Salah satunya adalah dengan mobilisasi penyuluh dari semua sektor pembangunan perlu dimobilisasi sesuai dengan pemangkunya. Mulai dari penyuluh pertanian, pendamping UMKM, pendamping desa, pendampingan mandiri oleh masyarakat dan LSM dikolaborasikan dan didorong untuk menjadi penasehat dan sebagai katalis dari proses transfer informasi dan teknologi yang dapat ditawarkan ke KTH. Dengan demikian pendampingan yang intensif melalui mobilisasi penyuluh sangat mungkin dilakukan, tinggal menyusun strategi dan koordinasi lembaga di tingkat provinsi.

3.3.4. Perbaikan Pola RHL

Perbaikan pola RHL dapat dilakukan dengan memilih skenario yang ada. Skenario pertama, adalah skenario pesimis, dan ini merupakan RHL dengan kondisi yang ada saat ini alias *Business As Usual* (BAU). Kedua, skenario moderat, dimana skenario RHL yang tertuang dalam Dokumen Road Map RHL Provinsi NTB 2012-2026 dijalankan sesuai dengan rencananya. Ketiga, skenario optimis, pelaksanaan RHL yang tertuang di dalam *Road Map* ditambah dengan peluang dan potensi yang ada.

Pada skenario optimis, dilakukan perbaikan lingkungan dengan mengubah pola RHL dari *Business As Usual* menjadi berbasis ekonomi melalui skema perhutanan sosial. Salah satu persyaratannya adalah pembangunan infrastruktur untuk pemenuhan sumber daya air. Hal ini didasarkan pada temuan lapangan bahwa hampir di semua lokasi, sumber daya air menjadi faktor pembatas keberhasilan RHL dan pengelolaan lahan. Skenario optimis memberikan peluang yang paling besar terhadap tingkat keberhasilan dari luas areal lahan kritis yang berhasil direboisasi di dalam kawasan hutan dan lahan kritis yang berada di luar kawasan hutan. Pada lahan-lahan yang berada di luar kawasan hutan, kebun-kebun petani memerlukan saluran air dan bak penampungan air mengingat sumber air cukup jauh dari lokasi kebunnya.

3.3.5. Agroforestri Multiusaha

Salah satu tantangan dari penerapan pola agroforestri adalah keterpenuhan kebutuhan lahan akan bibit yang berkualitas. Oleh karena itu penerapan pola agroforestri pada rehabilitasi lahan kritis dengan prinsip multiusaha kehutanan dapat diupayakan melalui pembangunan kebun bibit rakyat (KBR), kebun bibit desa (KBD) dan program lainnya yang mendukung pada ketersediaan bibit yang berkualitas. Pengadaan bibit tanaman buah bersertifikat merupakan salah satu upaya prioritas selain pengadaan bibit tanaman kayu. Bibit tanaman buah dalam multiusaha kehutanan masih mendapat proporsi yang tinggi dalam alternatif pilihan komoditi, seperti alpukat, nangka, mete, dan sebagainya.

3.3.6. Penyesuaian Pola Tanam

Kondisi yang diharapkan dari adanya penyesuaian pola tanam adalah meningkatnya tingkat adaptasi lingkungan terhadap perubahan iklim. Pemanfaatan lahan di bawah tegakan yang dimanfaatkan dapat memberikan kontribusi pendapatan rumah tangga petani, disamping tanaman utama sebagai peneduh dan juga penyerap karbon. Selain itu, jenis-jenis pohon yang ditanam turut berkontribusi pada konservasi tanah dan air.

Penyesuaian pola tanam salah satunya maksudkan untuk mengkomodir lahan kritis yang berada di luar kawasan hutan. Kegiatan penghijauan dapat dilakukan melalui pembangunan hutan rakyat, pembangunan hutan kota dan atau penghijauan lingkungan. Penanaman hutan rakyat dilaksanakan dengan jumlah paling sedikit 400 batang/ha dengan jenis tanaman kayu-kayuan dan atau pohon HHBK yang dapat dilakukan dengan pola tumpangsari atau murni. Penanaman hutan rakyat dengan pola tumpangsari dilaksanakan dengan kombinasi tanaman pokok kayu-kayuan dan atau pohon HHBK dengan ternak atau tanaman semusim. Salah satu lokasi pilot project yang berhasil dikunjungi memiliki potensi ternak yang besar, seperti di Desa Batu Jangkik Kecamatan Praya Barat Daya Kabupaten Lombok Tengah.

3.3.7. Peninjauan Kebijakan Penggunaan Lahan

Peninjauan ulang penggunaan lahan perlu dilakukan mengingat hasil kunjungan lapangan menunjukkan bahwa penggunaan lahan pada lahan yang ditetapkan statusnya sebagai lahan kritis, sudah ada yang berupa permukiman dan juga sawah produktif. Oleh karena itu, peninjauan pada RTRW dan RDTR di tiap level wilayah (prov-kab/kota/desa) dapat membantu melengkapi perencanaan secara lebih akurat, terutama untuk stakeholder di tingkat tapak yang melakukan kegiatan RHL di lokasi sasaran.

3.3.8. Pemantapan Kawasan

Penurunan kuantitas dan kualitas sumberdaya hutan dan lahan akibat *illegal logging*, perambahan, okupasi lahan dan perubahan bentang alam kawasan yang berpotensi menurunkan kualitas fungsinya masih terjadi di Provinsi NTB. Degradasi hutan dan lahan masih menjadi bagian dari tantangan pembangunan yang harus dihadapi oleh Pemerintah Provinsi NTB.

Degradasi tersebut disebabkan antara lain oleh aktifitas pertanian (agrikultur), pertambangan dan pembukaan lahan untuk jalan. Selain itu, degradasi hutan juga banyak disebabkan karena aktivitas penebangan liar dan tambang yang berdampak pada berkurangnya jumlah mata air. Berbagai aktifitas tersebut, selain memberikan dampak ekonomis juga telah mengurangi tutupan hutan dan lahan produktif lainnya.

Oleh karena itu, upaya untuk memantapkan kejelasan tata batas kawasan hutan untuk pengelolaan kawasan hutan dengan keterlibatan masyarakat secara partisipatif perlu dilakukan. Selain itu, penyadartahuan asas kepatuhan hukum terhadap masyarakat yang tinggal di dalam dan sekitar kawasan hutan juga perlu direncanakan mengingat jumlah desa yang ada di NTB yang berbatasan langsung dengan kawasan hutan tidak kurang dari 400 desa, di mana sekira 200 termasuk ke dalam desa miskin.

3.4. Fokus pada *Core Business* Kehutanan

Pembangunan yang selaras dengan *core business* kehutanan dapat dilakukan dengan mendorong usulan perhutanan sosial, menyusun potensi komoditi, transfer informasi dan pengetahuan serta pendampingan teknis produksi.

3.4.1. Usulan Perhutanan Sosial

Lahan kritis di Provinsi NTB dihitung seluas 202.672,11 ha atau sebesar 40,44% dari total lahan kritis yang ada menurut Satuan Pemetaan Sasaran Satu Alas dari Bappenas berlokasi di dalam kawasan hutan. Berdasarkan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.105/MENLHK/SETJEN/KUM.1/12/2018 tentang Tata Cara Pelaksanaan, Kegiatan Pendukung, Pemberian Insentif, serta Pembinaan dan Pengendalian Kegiatan Rehabilitasi Hutan dan Lahan, pada Pasal 19 disebutkan bahwa reboisasi pada Hutan Lindung dan Hutan Produksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) huruf b dan huruf c, dapat dilaksanakan pada areal perhutanan sosial, kecuali pada lokasi yang telah mendapatkan Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Hutan Tanaman Rakyat (IUPHHK HTR), dengan ketentuan:

- a. usulan lokasi berasal dari kelompok masyarakat;
- b. lokasi tidak tumpang tindih dengan kegiatan penanaman lainnya; dan
- c. lokasi yang diusulkan belum pernah menerima bantuan atau fasilitasi kegiatan sejenis.

Oleh karena itu, pengajuan persetujuan Perhutanan Sosial perlu didorong oleh pemangku kawasan.

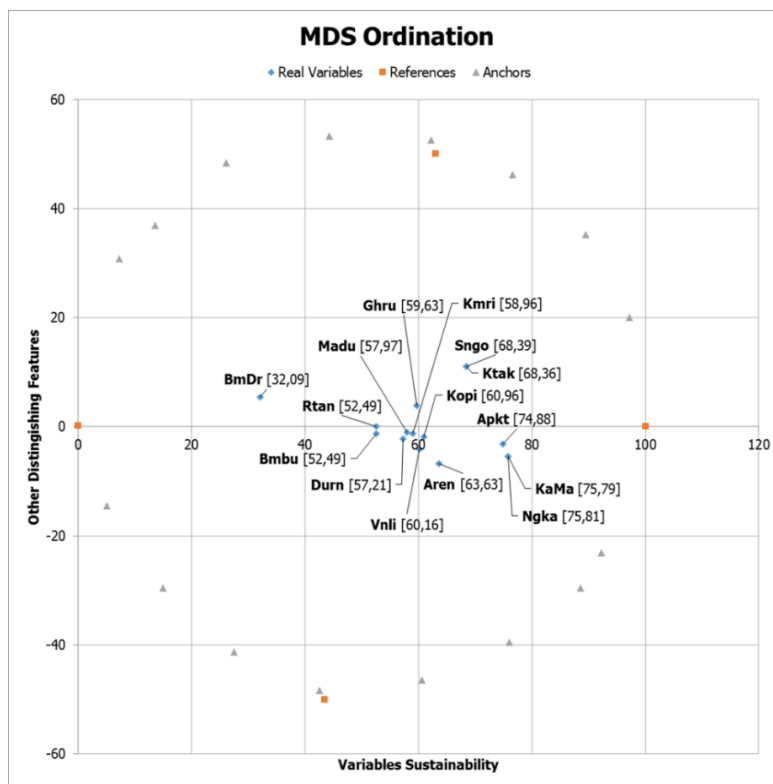
3.4.2. Potensi Komoditi

Berdasarkan hasil tinjauan pada dokumen *Road Map* RHL Provinsi NTB 2016-2026, komoditas yang direkomendasikan adalah kemiri, durian, kopi, kakao, nangka, pala, alpukat, vanili, lada, dan tanaman berbuah lainnya. Berikut adalah hasil identifikasi 15 (lima belas) komoditi potensial yang dapat dikembangkan dalam perencanaan RHL di Provinsi NTB.

Tabel 6. Daftar Komoditi Potensial Menurut Indeks dan Status Keberlanjutannya di Provinsi NTB

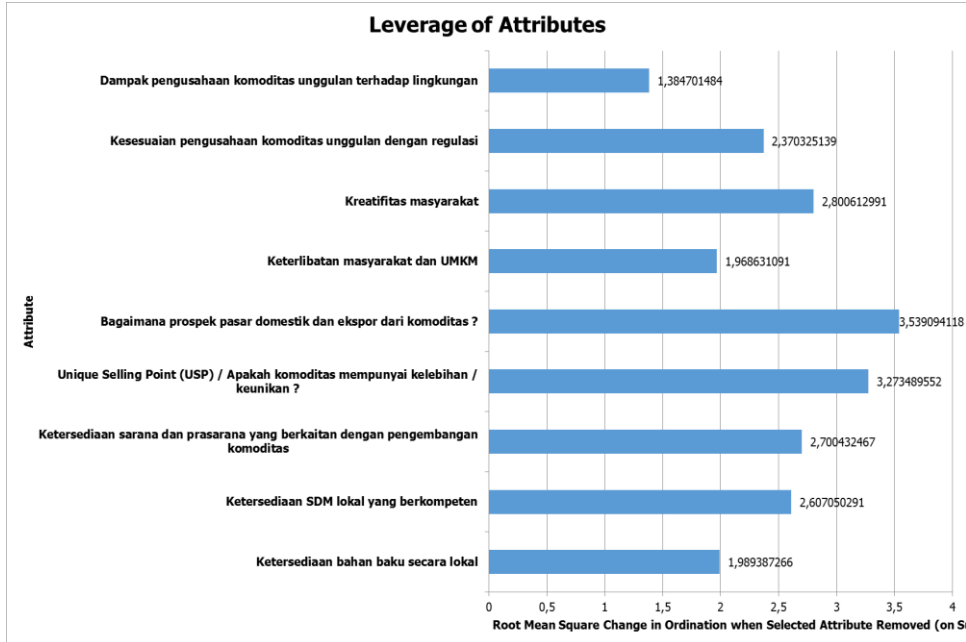
No	Komoditi	Singkatan	Indeks	Status Keberlanjutan
1	Alpukat	Apkt	74,88	Cukup
2	Aren	Aren	63,63	Cukup
3	Bambu	Bmbu	52,49	Cukup
4	Bambu Duri	BmDr	32,09	Kurang
5	Durian	Durn	57,21	Cukup
6	Gaharu	Ghru	59,63	Cukup
7	Kayu Manis	KaMa	75,79	Baik
8	Kemiri	Kmri	58,96	Cukup
9	Ketak	Ktak	68,36	Cukup
10	Kopi	Kopi	60,96	Cukup
11	Madu	Madu	57,97	Cukup
12	Nangka	Ngka	75,81	Baik
13	Rotan	Rtan	52,49	Cukup
14	Sengon	Sngo	68,39	Cukup
15	Vanili	Vnli	60,16	Cukup

Sumber: Bappenas, 2023

**Gambar 6.** Sebaran komoditi potensial menurut indeks dan status keberlanjutannya di Provinsi NTB

Sumber: Bappenas, 2023

Berdasarkan hasil analisis MDS RAPFISH, komoditi kayu manis dan nangka menjadi komoditi yang paling baik dan dianggap sangat berkelanjutan dari sisi atribut pengungkit. Sebagaimana yang ditampilkan pada gambar berikut, atribut yang paling sensitif dalam mengubah nilai indeks keberlanjutan dari setiap komoditi adalah prospek pasar, keunikan produk, dan kreativitas masyarakat serta ketersediaan sarana dan prasarana.



Gambar 6. Sebaran komoditi potensial menurut indeks dan status keberlanjutannya di Provinsi NTB

Sumber: Bappenas, 2023

3.4.3. Transfer Informasi & Pengetahuan

Keberadaan forum KTH perlu ditingkatkan baik jumlah maupun intensitas kegiatan dari forum yang sudah terbentuk. Hal ini berguna untuk berbagi informasi dan pengetahuan serta meningkatkan peluang kerjasama dalam berbagai aspek baik terkait perhutanan sosial maupun kegiatan perencanaan rehabilitasi lahan kritis di wilayah KTH. Salah satu temuan kasus di Desa Riwo, saat FGD dengan perwakilan 11 (sebelas) KTH, terdapat inisiatif dari salah satu KTH yang menawarkan bibit jahe dan kunyit untuk memfasilitasi seluruh kebutuhan bibit di lahan petani di Desa Riwo.

3.4.4. Pendampingan Teknis Produksi

Meningkatnya intensitas pendampingan dan penyeteraan dalam penyebaran penyuluhan di tingkat tapak dapat mendorong pada peningkatan monitoring dan dukung pemerintah daerah dan pemangku kawasan terhadap tahapan kegiatan rehabilitasi. Sehingga, frekuensi kunjungan PPL ke kebun petani, pemantauan dari Dinas LHK Provinsi ke KTH, pendampingan dari BKPH ke KTH dan pemantauan dari lembaga donor ke KTH setiap tahunnya dapat berjalan.

3.4.5. Keterlibatan Masyarakat Sekitar Hutan

Kegiatan RHL dapat meningkatkan taraf hidup masyarakat yang tinggal di sekitar kawasan hutan dengan keterlibatannya dalam seluruh tahapan kegiatan. Keberhasilan yang tinggi dalam kegiatan RHL harus menjadi kewajiban adanya keterlibatan masyarakat sekitar hutan. Karena

kegiatan RHL yang selama ini hanya dipihakketigakan terbukti tidak efektif dan tidak berhasil dalam perjalanannya dan mengacaukan seluruh target pencapaian RHL.

Pemberdayaan masyarakat setempat dilakukan melalui peningkatan kemampuan dan kemandirian masyarakat setempat untuk mendapatkan manfaat dari RHL yang dilaksanakan secara optimal dan adil dalam rangka peningkatan kesejahteraannya.

3.4.6. Pasar Komoditi

Salah satu kondisi yang diharapkan pasca intervensi program adalah tersedianya rantai pasok yang stabil untuk komoditi yang dikembangkan, mulai dari kuantitas, kualitas dan kontinuitas komoditi yang diproduksi. Oleh karena itu, upaya dalam membentuk dan memperluas pangsa pasar komoditi yang diusahakan serta merencanakan momentum penjualan perlu dilakukan. Proposal NTB Hijau memuat sebaran potensial cikal bakal industri kehutanan di Provinsi NTB dengan komoditi potensialnya masing-masing. Cikal bakal arah pengembangan industri kehutanan ke depan yang menjadi target NTB Hijau antara lain industri pengolahan kayu putih dan nilam, industri bambu, industri pengolahan minyak nilam, industri pengolahan minyak cengkeh, industri kayu lapis dan industri pengolahan rotan. Rencana ini tentu saja akan melibatkan masyarakat petani yang berpeluang untuk memasok bahan baku kebutuhan industri masing-masing.

3.4.7. Peningkatan Skala Usaha

Pemberdayaan masyarakat sekitar hutan pada wilayah pemanfaatan hutan kemasyarakatan masih terkendala kurangnya keterampilan masyarakat dalam teknik budidaya tanaman hasil hutan bukan kayu, pola pertanian subsisten yang belum berorientasi pasar, lemahnya kelembagaan kelompok yang membatasi akses modal dan akses pasar untuk menuju kemandirian. Penyusunan rencana pendampingan untuk peningkatan skala usaha ekonomis pada level kelompok tani menjadi mutlak diperlukan. Rencana peningkatan skala usaha ekonomi ini dapat menjadi satu proposal yang dapat ditawarkan kepada berbagai pihak untuk memberikan kontribusi percepatan peningkatan skala usaha dan kemandirian masyarakat. Adanya kontribusi dari berbagai pihak di tingkat lokal seperti komunitas pecinta lingkungan, LSM, NGO, dan para stakeholder di tingkat tapak terhadap peningkatan skala usaha masyarakat di lokasi sasaran RHL merupakan kondisi yang diharapkan terjadi pada akhir kegiatan. Selain itu, peningkatan pendapatan masyarakat melalui pendampingan usaha dari masyarakat yang terlibat menyasar rumah tangga petani untuk meningkatkan angka persentase nilai tukar petani (NTP) di Provinsi NTB.

3.4.8. Dukungan Kebijakan

Program rehabilitasi hutan dan lahan kritis belum terkoordinasi dengan baik. Program rehabilitasi hutan dan lahan kritis belum terintegrasi dalam program dan kegiatan setiap dinas/instansi/satuan kerja lainnya, baik di tingkat provinsi maupun di kabupaten/kota. Hal ini juga terlihat dengan minimnya dukungan data dan informasi dari kabupaten/kota sebagai salah satu bahan penentuan kebijakan program RHL. Oleh karena itu, diperlukan adanya integrasi program rehabilitasi hutan dan lahan kritis di tingkat kabupaten/kota yang berbasis pada pengembangan wilayah di lokasi sasaran yang dapat memberikan peluang peningkatan skala bisnis dari komoditi yang ditanam.

Salah satu dukungan kebijakan terkait hal ini adalah Insentif Fiskal Berbasis Ekologi di NTB. Transfer Anggaran Berbasis Ekologi merupakan transfer fiskal dari pemerintah yang lebih tinggi (nasional, provinsi dan kabupaten/kota) kepada pemerintah dibawahnya (provinsi, kabupaten/kota, dan desa) dalam yurisdiksi yang sama berdasarkan kewenangan dan kinerja

dalam perlindungan dan pengelolaan kehutanan dan lingkungan hidup. Pembagian sistem insentif fiskal secara aspek teknis terdiri dari 4 yaitu:

- a. **Transfer fiskal dari Provinsi ke Kabupaten.** Transfer ini dapat dilakukan dengan memformulasikan mekanisme pemberian bantuan keuangan khusus kepada pemerintah kabupaten yang bersumber dari sumber keuangan provinsi baik dalam bentuk dukungan finansial maupun infrastruktur sebagai insentif atas pencapaian komitmen dalam mendorong sinergi program di tingkat provinsi.
- b. **Transfer Fiskal dari Kabupaten ke Desa.** Mekanisme transfer ini dilakukan oleh pemerintah kabupaten kepada desa-desa yang dinilai memiliki komitmen tinggi dalam mendorong program prioritas di tingkat kabupaten. Sumber alokasi pembiayaan dapat bersumber dari dana insentif kabupaten dan reformulasi alokasi dana desa berbasis pada indeks kinerja di tingkat desa (alokasi dasar, alokasi proporsional dan alokasi kinerja tambahan).
- c. **Transfer Fiskal dari Provinsi ke Desa.** Mekanisme ini memberikan ruang bagi provinsi untuk memberikan insentif fiskal langsung kepada desa-desa yang dianggap konsisten dan memiliki komitmen dalam mendukung program prioritas di tingkat provinsi. Skema ini dapat diberikan dalam bentuk stimulus anggaran percepatan pembangunan berbasis pada kluster inovasi yang dilakukan di tingkat desa.
- d. **Alokasi Anggaran Berbasis Kinerja.** Mekanisme ini dilakukan dengan memberikan alokasi anggaran yang bersumber dari APBD NTB kepada OPD-OPD yang memenuhi target kinerja tertentu berbasis kluster inovasi yang menjadi fokus program prioritas gubernur.

3.5. Peluang dan Dukungan Pendanaan

3.5.1. Kementerian Dalam Negeri

Berdasarkan paparan Direktur Sinkronisasi Urusan Pemerintahan Daerah I Direktorat Jenderal Bina Pembangunan Daerah Kementerian Dalam Negeri yang berjudul Sinkronisasi Kebijakan Rehabilitasi Hutan dan Lahan di Daerah, disebutkan bahwa terdapat 4 peran Kemendagri dalam RHL yaitu:

- a. melaksanakan pembinaan dan pengawasan umum penyelenggaraan urusan daerah;
- b. menerbitkan surat terkait dukungan terhadap pelaksanaan rehabilitasi hutan dan lahan;
- c. mengkoordinasikan pelaksanaan program dan pencapaian target pemerintah pusat; dan
- d. mengoptimalkan sinkronisasi dan harmonisasi program kegiatan terkait RHL dalam dokumen perencanaan dan penganggaran daerah.

Terkait dengan peran keempat, terdapat pagu anggaran terkait RHL dalam RKPD 2022 pada Bidang Kehutanan Sub Urusan Pengelolaan Hutan untuk Wilayah IV yakni Provinsi NTB, sebagaimana yang disajikan pada Tabel 7 berikut.

Tabel 7. Pagu anggaran dalam program/kegiatan/subkegiatan untuk wilayah IV Kemendagri menurut RKPD 2022 pada bidang kehutanan suburusan pengelolaan hutan

Provinsi	OPD	Kode	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Pagu
NTB	Dinas	3.28.03	Program Pengelolaan Hutan	Rp12.230.759.637
	Lingkungan Hidup dan Kehutanan	3.28.03.1.04	Pelaksanaan Rehabilitasi di Luar Kawasan Hutan Negara	Rp3.318.590.000
		3.28.03.1.04.01	Penyusunan Rencana Tahunan Rehabilitasi Lahan (RTnRL)	Rp66.242.600
		3.28.03.1.04.02	Pembangunan Hutan Rakyat di Luar Kawasan Hutan Negara	Rp1.447.019.100
		3.28.03.1.04.04	Pembangunan Penghijauan Lingkungan di Luar Kawasan Hutan Negara	Rp1.571.660.100
		3.28.03.1.04.06	Pengembangan Perbenihan untuk Rehabilitasi Lahan	Rp64.545.400
		3.28.03.1.04.08	Pembinaan dan/atau Pengawasan dalam Rangka Pengembangan Rehabilitasi Lahan	Rp169.122.800

Sumber: Direktorat Sinkronisasi Urusan Pemerintahan Daerah I, 2022

3.5.2. Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Bappenas

Terdapat peluang pendanaan dari Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Bappenas Bidang Kehutanan Sub Bidang Kehutanan-Tematik Pengembangan Food Estate dan Sentra Produksi Pangan dengan Menu Kegiatan Rehabilitasi Hutan dan Lahan (RHL) di Luar Kawasan Hutan berdasarkan Dana KRISNA (Kolaborasi Perencanaan dan Informasi Kinerja Anggaran) periode Agustus 2021 sebesar Rp38.041.750.000 untuk Penanaman Hutan Rakyat di 51 kecamatan dan 7 kabupaten di Provinsi NTB seluas **4.475,5 ha** sebagaimana disajikan pada Tabel 8 berikut.

Tabel 8. Data Krisna pada Kementerian PPN/Bappenas untuk penanaman hutan rakyat di Provinsi NTB

No	Kabupaten/Kota	Luas (ha)	Sebaran Lokasi (kecamatan)	Total Usulan (Rp)	Status Penilaian
1	Kab. Bima	1.160	13	9.860.000.000	In Stock
2	Kab. Dompu	1.415	8	12.027.500.000	In Stock
3	Kab Sumbawa	1.106	13	9.396.750.000	In Stock
4	Kab. Sumbawa Barat	300	6	2.550.000.000	In Stock
5	Kab. Lombok Timur	120	5	1.020.000.000	In Stock
6	Kab. Lombok Tengah	150	3	1.275.000.000	In Stock
7	Kab. Lombok Barat	225	3	1.912.500.000	In Stock
Total Usulan		4.476	51	38.041.750.000	In Stock

Keterangan: In Stock merupakan program cadangan yang akan dibiayai jika terdapat sisa anggaran.

Sumber: Data Krisna DAK 2022 per tanggal 3 Agustus 2021, hasil sangat sementara, menunggu koordinasi lebih lanjut

3.5.3. BPDASRH Dodokan Moyosari

Pembagian peran untuk rehabilitasi APBN/KLHK melalui BPDASRH Dodokan Moyosari ditetapkan pada area seluas 20.000 ha. Sampai tahun 2021, telah dipenuhi seluas 17.950 ha, maka masih tersisa kuota seluas 2.050 ha yang kegiatan rehabilitasinya dapat diarahkan untuk

pembangunan ekonomi sosial dan lingkungan berbasis hutan di lokasi yang telah ditetapkan.

Tabel 9. Potensi CSR untuk RHL di Provinsi NTB

No	Pemegang IPPKH	Lokasi	Jenis IPPKH		Luas Total Area Izin (ha)
			Non Tambang	Tambang	
1	Amman Mineral Nusa Tenggara, PT (d/h Newmont Nusa Tenggara, PT)	Sumbawa Barat	-	6.401,47	6.401,47
2	Bumi Pasir Mandiri, PT	Sumbawa Barat	-	64,44	64,44
3	Bupati Dompu	Dompu	380,16	-	380,16
4	Bupati Lombok Barat	Lombok Barat	10,11	-	10,11
5	Bupati Sumbawa Barat	Sumbawa Barat	481,35	-	481,35
6	Excelmindo Pratama Tbk, PT	Lombok Tengah	0,22	-	0,22
7	Exelcomindo Pratama Tbk, PT	Lombok Barat	0,07	-	0,07
8	Indotan Lombok Barat Bangkit, PT	Lombok Barat	-	172,51	172,51
9	Indotan Sumbawa Barat, PT	Sumbawa Barat	-	482,49	482,49
10	Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat	Dompu	14,21	-	14,21
11	Ngali Sumbawa Mining, PT	Sumbawa	-	51,13	51,13
12	Pemerintah Kabupaten Sumbawa Barat	Sumbawa Barat	262,37	-	262,37
13	PLN (Persero), PT		64,78	-	64,78
		Lombok Tengah	3,37	-	3,37
		Lombok Utara	4,47	-	4,47
		Lombok Utara & Lombok Barat	3,39	-	3,39
		Sumbawa, Dompu dan Bima	53,55	-	53,55
14	Sumbawa Jutaraya, PT	Sumbawa		1.001,90	1.001,90
15	XL Axiata Tbk, PT		0,88	-	0,88
		Bima	0,16	-	0,16
		Dompu	0,19	-	0,19
		Sumbawa	0,53	-	0,53
Grand Total			1.214,16	8.173,94	9.388,10

Sumber: Bappenas, 2023

3.5.4. Alokasi Dana Desa

Dalam Road Map RHL NTB Hijau 2019-2023, terdapat pembagian peran untuk kerjasama pengembangan agroforestri dengan 486 BUMDes yang melibatkan dana desa bagi desa-desa yang berada di sekitar hutan. Jumlah ini equivalent dengan area seluas 97.200 ha.

3.5.5. CSR Perusahaan

Dalam Road Map RHL NTB Hijau 2019-2023, terdapat pembagian peran untuk rehabilitasi pemegang ijin IPPKH untuk area seluas 10.000 ha. Terdapat 15 (lima belas) pemegang IPPKH di Provinsi NTB dengan luas areal 9.388,10 ha yang sebagian besar dimiliki oleh izin perusahaan pertambangan. Data selengkapnya disajikan pada tabel 9 berikut.

IV. Kesimpulan dan Rekomendasi

4.1. Kesimpulan

Langkah-langkah strategis RHL yang efektif, efisien, dan tepat sasaran sebagai bagian dari pembangunan kehutanan berkelanjutan di Provinsi NTB dapat dilakukan melalui:

- a. Menetapkan lokasi prioritas sebagai titik pertumbuhan RHL yang berbasis pengembangan wilayah;
- b. Memfasilitasi KTH dalam penguatan organisasi petani;
- c. Memberikan pendampingan yang intensif melalui mobilisasi penyuluh yang ada dengan metode pendampingan yang disesuaikan;
- d. Melakukan perbaikan lingkungan dengan mengubah pola RHL dari *Business As Usual* menjadi berbasis ekonomi melalui skema perhutanan sosial; dan
- e. Menerapkan pola agroforestri pada rehabilitasi lahan kritis dengan prinsip multiusaha kehutanan.

Tercapainya kualitas hutan dan lahan melalui pengelolaan hutan lestari di Provinsi NTB dapat dilakukan melalui:

- a. Menentukan kesesuaian pola tanam dan jenis komoditi yang berkontribusi pada peningkatan serapan karbon;
- b. Melakukan peninjauan pada RTRW dan RDTR di tiap leveling wilayah (Prov-Kab/Kota/Desa) mengingat penggunaan lahan pada sebagian lahan kritis sudah berbentuk permukiman dan lahan sawah produktif; dan
- c. Memantapkan kejelasan tata batas kawasan hutan untuk pengelolaan kawasan hutan dengan keterlibatan masyarakat secara partisipatif dan penyadartahuan asas kepatuhan hukum terhadap masyarakat yang tinggal di dalam dan sekitar kawasan hutan.

Tercapainya pembangunan yang selaras dengan *core business* kehutanan dapat dilakukan melalui:

- a. Menetapkan HHK, HHBK dan jasa lingkungan sebagai *core business*;
- b. Mendorong pengajuan persetujuan Perhutanan Sosial;
- c. Menyusun potensi tanaman dan HHBK yang cocok di lokasi sasaran, termasuk bagi kelompok tani yang selama ini mengelola hutan di APL;
- d. Meningkatkan forum KTH guna berbagi pengetahuan dan peningkatan kerja sama dalam berbagai aspek terkait Perhutanan Sosial; dan
- e. Meningkatkan intensitas pendampingan dan penyeteraan dalam penyebaran penyuluhan di tingkat tapak.

Meningkatkan taraf hidup masyarakat yang tinggal di sekitar kawasan hutan dapat dilakukan melalui:

- a. Membentuk dan memperluas pangsa pasar komoditi yang diusahakan serta merencanakan momentum penjualan dengan baik;

- b. Menyusun rencana pendampingan untuk peningkatan skala usaha ekonomis pada level kelompok tani; dan
- c. Memberikan dukungan peraturan yang dapat meningkatkan peluang bisnis.

Dengan demikian, maka pembangunan ekonomi, sosial, dan lingkungan berbasis hutan di Provinsi NTB dalam rangka mewujudkan NTB Hijau dapat tercapai.

4.2. Rekomendasi

1. Pemangku kepentingan kawasan hutan perlu meningkatkan akurasi indikasi pada lahan kritis dan rencana prioritas penanaman beserta skema dan pengelolaannya.
2. Kementerian LHK dan Dinas terkait di Provinsi NTB perlu mendorong pola penanaman di kawasan hutan dan APL melalui swakelola dengan jenis tanaman yang cocok dan bernilai ekonomi tinggi.
3. Bappeda dan Dinas terkait di Provinsi NTB perlu menetapkan perencanaan prioritas pada daerah-daerah yang sesuai dengan visi pembangunan nasional dan regional melalui pendekatan holistik, integratif, tematik dan spasial (HITS).
4. Kementerian PPN/Bappenas dan Kemendagri perlu meningkatkan arus informasi skema-skema pendanaan pembangunan berbasis hutan dan lingkungan.
5. Para pemangku kepentingan perlu meningkatkan kolaborasi multi pihak baik vertikal (K/L/D) maupun lintas (Pemerintah/Swasta/Akademisi/Masyarakat).

Daftar Pustaka

- Buckingham, Kathleen, Sabin Ray, Carolina Gallo Granizo, Lucas Toh, Fred Stolle, Faustine Zoveda, Katie Reytar, et al. 2019. *THE ROAD TO RESTORATION A Guide to Identifying Priorities and Indicators for Monitoring Forest and Landscape Restoration*. Washington DC: World Resources Institute; Food and Agriculture Organization of the United Nations.
- Dinas Kehutanan Provinsi Nusa Tenggara Barat. 2016. *Road Map Rehabilitasi Hutan dan Lahan Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2016-2016*. Mataram: Dinas Kehutanan Provinsi Nusa Tenggara Barat.
- Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Nusa Tenggara Barat. 2021. "Capaian Kinerja Program/Kegiatan TA 2020 dan Rencana kerja TA 2021 & TA 2022." *Paparan Presentasi*.
- . 2019. *Rencana Strategis 2019-2023*. Mataram: Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Nusa Tenggara Barat.
- Direktur Sinkronisasi Urusan Pemerintahan Daerah I. 2021. "Sinkronisasi Kebijakan Rehabilitasi Hutan dan Lahan di Daerah." *Paparan Presentasi* Direktorat Jenderal Bina Pembangunan Daerah Kementerian Dalam Negeri.
- FAO, IUCN CEM & SER. 2021. *Principles for ecosystem restoration to guide the United Nations Decade 2021-2030*. Rome: FAO.
- KLHK. 2019. "Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.105/MENLHK/SETJEN/KUM.1/12/2018 tentang Tata Cara Pelaksanaan, Kegiatan Pendukung, Pemberian Insentif, serta Pembinaan dan Pengendalian Kegiatan Rehabilitasi Hutan dan Lahan." Dalam *Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 16*. Jakarta: Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan.

- Mukarom, Madani. 2022. "Rehabilitasi Hutan dan Lahan untuk Ketahanan Bencana dan Perubahan Iklim Provinsi Nusa Tenggara Barat." *Paparan Presentasi*.
- Primabodo, Djarot. 2021. "Rehabilitasi Hutan dan Lahan untuk Ketahanan Bencana di Provinsi NTB." *Paparan Presentasi* Disampaikan dalam Rapat Koordinasi Usulan Gubernur NTB pada Penyusunan RKP 2022.
- Rahayu, Nur Hygiawati. 2021. "Pembahasan Usulan Kegiatan Rehabilitasi Hutan dan Lahan Provinsi Nusa Tenggara Barat." *Paparan Presentasi* Direktorat Kehutanan dan Konservasi Sumber Daya Air Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Bappenas.
- Tim TAPE NTB. 2022. "Review Proses Insentif Fiskal Berbasis Ekologi di NTB." *Paparan Presentasi* 1-26.